



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Tak Sahkan RUU Krusial
Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Tak Sahkan RUU Krusial

Hanya Tiga Jadi UU

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Rancangan regulasi yang krusial, seperti RUU tentang KUHP, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, hanya masuk pengesahan perpanjangan.

"Syukur alhamdulillah tiga RUU menjadi undang-undang," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/2).

Antaranya, RUU tentang Pengesahan Janjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dan Masalah Pidana Antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. RUU ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tak lagi me-negenal batas negara. Termasuk, tindak pidana di bidang perpajakan dan bea cukai.

"Perjanjian ini akan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantas tindak pidana antara kedua negara," kata politikus Partai Golkar itu.

Lalu, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah Indonesia dan Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. Terakhir,

RUU Kebidanan. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan pasien.

"RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan Indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan dari luar negeri. Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat," kata Bam-

soet- sapana akrab Bambang. Disinggung soal mengapa RUU krusial tidak disahkan dalam rapat paripurna saat ini? Bamsuet mengatakan, RUU tersebut dianggap pengesahan perpanjangan disahkan, sayangnya yang pertama kali menyatakan mundur dari ketua DPR RI," kata Bamsuet.

Diketahui, buniy broadcast dari WA

soal UU LGBT adalah "Innalilah wa Inna ilahi Raj'un LGBT telah disahkan UUD LGBT. Ternyata PPP & PKB ikut mendukung. Infonya seperti ini: Tidak dipublikasikan pak, sengaja takut dikonfrontasi... yang jelas fraksi PKS, Gerindra, PAN nangis di DPR". (aen)

Tidak ada satu kalimat pun yang memberi ruang dan peluang bagi pengesahan adanya LGBT maupun perzinahan, baik itu di KUHP maupun RUU PKS," ucap Bamsuet. "Jadi saya yakinkan dan saya nyatakan dengan tegas tidak ada itu," tegasnya.

Di samping publik tidak khawatir. Bahkan jika ada pengesahan LGBT, dirinya siap mundur dari jabatan. "Saya sudah menyampaikan kalau ada LGBT yang sampai masuk disahkan, saya yang pertama kali menyatakan mundur dari ketua DPR RI," kata Bamsuet.

Diketahui, buniy broadcast dari WA soal UU LGBT adalah "Innalilah wa Inna ilahi Raj'un LGBT telah disahkan UUD LGBT. Ternyata PPP & PKB ikut mendukung. Infonya seperti ini: Tidak dipublikasikan pak, sengaja takut dikonfrontasi... yang jelas fraksi PKS, Gerindra, PAN nangis di DPR". (aen)

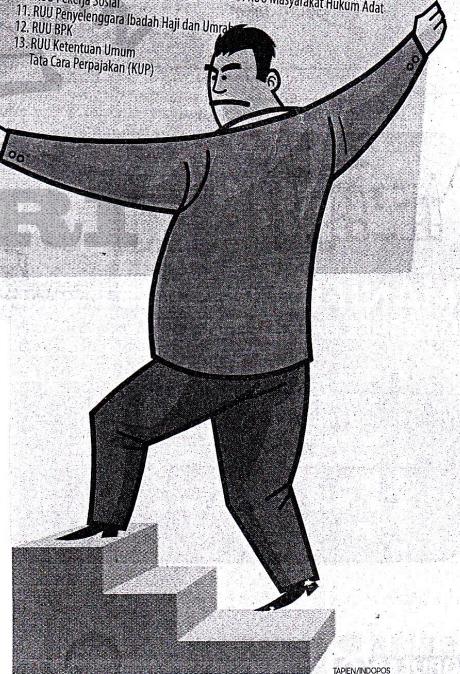
RUU Masuk Paripurna :

A RUU Disahkan Jadi UU

1. RUU Tentang Pengesahan Janjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dan Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab
2. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan
3. RUU Tentang Kebidanan

B RUU Diagendakan Pengesahan Perpanjangan Pembahasan

1. RUU Pertahanan
2. RUU KUHP
3. RUU Jabatan Hakim
4. RUU Mahkamah Konstitusi
5. RUU Pemasyarakatan
6. RUU Sumber Daya Air
7. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. RUU Perkerasan
9. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
10. RUU Pekerja Sosial
11. RUU Penyelegaran Ibadah Haji dan Umrah
12. RUU BPK
13. RUU Keter tutuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP)
14. RUU Materai
15. RUU Konsultasi Pajak
16. RUU Sifnas Iptek
17. RUU Wawasan Nusantara
18. RUU Kewirausahaan Nasional
19. RUU Larangan Minuman Beralkohol
20. RUU Daerah Kepulauan
21. RUU Pertembakauan
22. RUU Aparatur Sipil Negara
23. RUU Masyarakat Hukum Adat



TAPEN/INDOSO